



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Alasan Tiongkok Menyepakati Sanksi terhadap Korea Utara

Skripsi

Oleh

Lidya Pandumas

2015330083

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Alasan Tiongkok Menyepakati Sanksi terhadap Korea Utara

Skripsi

Oleh

Lidya Pandumas

2015330083

Pembimbing

Idil Syawfi, M.Si.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Lidya Pandumas
Nomor Pokok : 2015330083
Judul : Alasan Tiongkok Menyetujui Sanksi terhadap Korea Utara

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 15 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira : _____

Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. : _____

Anggota

Idil Syawfi, SIP., M.Si. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lidya Pandumas

NPM : 2015330083

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Alasan Tiongkok Menyepakati Sanksi terhadap Korea Utara

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Agustus 2019

Lidya Pandumas

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan karena atas berkat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Alasan Tiongkok Menyepakati Sanksi terhadap Korea Utara.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini mengenai hubungan baik dalam aliansi Tiongkok dan Korea Utara, tetapi Tiongkok menyepakati sanksi terhadap Korea Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan Tiongkok menyepakati sanksi dari DKPBB terhadap Korea Utara. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu pembaca terkait hubungan aliansi antara Tiongkok dengan Korea Utara. Penelitian ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Sehingga diharapkan penulisan ini mendapatkan masukan dari pembaca untuk penyempurnaan pada penelitian-penelitian selanjutnya terakit topik serupa.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sehingga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan morel maupun materi baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih banyak saya haturkan kepada:

1. Ayah, Ibu, dan Kakak yang telah memberikan perhatian, dorongan, dan doa bagi penulis untuk kelancaran penyelesaian skripsi.
2. Bapak Idil Syawfi, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Sylvia Yazid, Ph.D selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

4. Bapak Dr. I Nyoman Sudira dan Bapak Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran.
5. Seluruh dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh staf dan tenaga kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
7. Odhie Hardanu yang telah memberikan dukungan morel.
8. Teman-teman *group* LINE #2019UdahS.Hub.Int yang memotivasi untuk lulus bersama pada tahun 2019 dan telah memberikan informasi terkait penulisan skripsi.
9. Teman-teman ORKAY yang telah menemani dan memberi hiburan semasa pengerjaan skripsi.
10. Terima kasih kepada Alexander Gavana, Chaterin Imanuel, Devira Sharvensya, Geraldi Halomoan, Ghina Cecilia, Jessica Vidichristia, Lea Benanya, Michael Hans, Milzam Muhammad Al-Fatih, Muhammad Nabil, Septiviana Thomson, dan William Wicaksana atas segala bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

ABSTRAK

Nama : Lidya Pandumas
NPM : 2015330083
Judul : Alasan Tiongkok Menyetujui Sanksi terhadap Korea Utara

Hubungan aliansi antara Tiongkok dan Korea Utara merupakan hubungan aliansi yang sudah lama terbentuk. Kedua negara tersebut dikenal memiliki hubungan aliansi yang sangat erat hingga dianalogikan sebagai “*Lips and Teeth*.” Meskipun begitu, Tiongkok menyetujui sanksi tambahan terhadap Korea Utara yang tercantum dalam Resolusi DKPBB 2356. Anomali tersebut memunculkan pertanyaan penelitian, “Mengapa Tiongkok menyetujui pemberian sanksi tambahan dalam Resolusi DKPBB 2356 (2017) terhadap Korea Utara?” Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu alasan Tiongkok menyetujui sanksi tambahan dalam Resolusi DKPBB 2356 terhadap Korea Utara yang merupakan aliansinya. Mengkaji permasalahan yang ada, dalam tulisan ini akan dipergunakan teori *The Security Dilemma in Alliance Politics* oleh Glenn H. Snyder dan *Autonomy-Security Trade-off* oleh James D. Morrow. Dalam tulisan ini peneliti berusaha membuktikan bahwa alasan Tiongkok menyetujui pemberian sanksi tambahan terhadap Korea Utara didasari oleh sikap *defect* Korea Utara. Sikap *defect* Korea Utara menyebabkan lemahnya komitmen dalam aliansi Tiongkok-Korea Utara. Sehingga, berdampak pada tingginya *abandonment* oleh Tiongkok.

Kata kunci: Tiongkok, Korea Utara, Sanksi, DKPBB, Aliansi, Tiongkok-Korea Utara, Hubungan Internasional, Nuklir

ABSTRACT

Name : Lidya Pandumas
Student ID : 2015330083
Title : *China's Reason behind Sanction Agreement against North Korea*

Alliance relation between China and DPRK has established since 1961. Sino-DPRK's relation has known as a special relationship between states. The most popular term describes Sino-DPRK relation is the "Lips and Teeth" alliance. Even so, China has agreed to an additional sanction against DPRK which is listed in UNSC Resolution 2356. This study aims to find out why China agreed on an additional sanction against its ally. The anomaly has led to a research question, "Why does China agree to an additional sanction against DPRK which is listed in UNSC Resolution 2356?" To examine the existing matter, this paper applies 'The Security Dilemma in Alliance Politics' theory by Glenn H. Snyder and 'Autonomy-Security Trade-off' by James D. Morrow. This paper attempt to prove that defection by North Korea has led to a weak commitment to the Sino-DPRK relation. The weak commitment causes abandonment by China against DPRK.

Key words: China, North Korea, Sanction, UNSC, Alliance, Sino-DPRK, International Relations, Nuclear

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	4
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kajian Literatur	6
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	14
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB II.....	17
Perubahan Sikap Tiongkok sebagai Reaksi terhadap Aksi Korea Utara	17
2.1 Aliansi Tiongkok dan Korea Utara.....	17
2.1.1 Tiongkok Beraliansi dengan Korea Utara.....	17
2.1.2 Hubungan Tiongkok dan Korea Utara Pasca Perang Korea	19
2.1.3 Awal Pengembangan Nuklir Korea Utara dan Respon Tiongkok	21
2.2 Uji Coba Nuklir Korea Utara, Respon Tiongkok, dan Resolusi DKPBB ...	24
2.2.1 Uji Coba Nuklir Pertama Korea Utara.....	24
2.2.2 Uji Coba Nuklir Kedua Korea Utara	26
2.2.3 Uji Coba Nuklir Ketiga Korea Utara	28
2.2.4 Uji Coba Nuklir Keempat Korea Utara	30
2.2.5 Uji Coba Nuklir Kelima Korea Utara.....	32

2.2.6	Uji Coba Nuklir Keenam Korea Utara	35
2.3	<i>Six Party Talks</i> dan Perubahan Sikap Tiongkok terhadap Korea Utara	36
2.3.1	Sikap Agresif Korea Utara dan Perlindungan dari Tiongkok	37
2.3.2	Sikap Agresif Korea dan Perubahan Sikap Tiongkok	39
BAB III	42
Analisis Penyepakatan Sanksi oleh Tiongkok terhadap Korea Utara	42
3.1	Intepretasi Penulis terhadap Data	42
3.1.1	Peningkatan Kapabilitas Nuklir Korea Utara Ditentang Tiongkok.....	42
3.1.2	Respon Negatif Tiongkok terhadap Uji Nuklir Korea Utara	44
3.1.3	Keluarnya Korea Utara dari Six Party Talks Menyebabkan Perubahan Sikap Tiongkok	45
3.1.4	Resolusi 2356 (2017) menunjukkan Perubahan Sikap Tiongkok	47
3.2	Perubahan Sikap Tiongkok terhadap Korea Utara dan <i>The Autonomy-Security Trade-off Model of Alliance Behavior</i>	49
3.3	Perubahan Komitmen dalam Aliansi Tiongkok-Korea Utara dan <i>The Security Dilemma in Alliance Politics</i>	56
BAB IV	66
Kesimpulan	66
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Model Analisis.....	13
-----------	---------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

DKPBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
USD	<i>United State Dollar</i>
NPT	Non-Proliferation of Nuclear Treaty
IAEA	International Atomic Energy Agency
DPRK	Democratic People's Republic of Korea
ASEM	Asia-Europe Meeting
KCNA	Korean Central News Agency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tiongkok dan Korea Utara telah beraliansi sejak tahun 1961.¹ Hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara selalu dianalogikan seperti hubungan *Lips and Teeth* yang sangat dekat, keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Keberadaan bibir dibutuhkan untuk melindungi gigi agar tidak kedinginan. Sementara bibir tanpa gigi akan kehilangan kemampuan untuk mengigit. Keeratan hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara seringkali dianalogikan dengan berbagai cara. Ada analogi yang menggambarkan hubungan Tiongkok sebagai *big brother* bagi Korea Utara.

Kedekatan hubungan antara Korea Utara dan Tiongkok terjadi sejak Semenanjung Korea terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Di mana Korea Utara memiliki ideologi yang sama dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Sementara, Korea Selatan memiliki ideologi yang sama dengan Amerika Serikat. Awalnya hubungan Korea Utara dengan Tiongkok belum mencapai titik yang sangat akrab. Tetapi, bantuan Tiongkok terhadap Korea Utara pada masa Perang Korea yang

¹ Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance Between the People's Republic of China and the Democratic People's Republic of Korea Article I-VII, Pobzeb Vang, Five Principles of Chinese Foreign Policies (Indiana: Author House, 2008), 492

mencegah Korea Utara kalah telak menjadi titik awal keakraban antara Korea Utara dan Tiongkok.²

Pasca Perang Korea, kedua negara tersebut menandatangani traktat aliansi yang bernama *Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance between the People's Republic of China and the Democratic People's Republic of Korea* pada tahun 1961. Traktat ini menjadi dasar bagi hubungan aliansi antara Tiongkok dan Korea Utara.³

Tiongkok dan Korea Utara memiliki hubungan yang sangat istimewa dibandingkan hubungan kerja sama ataupun aliansi antar negara pada umumnya. Hubungan istimewa ini terlihat dari tingginya jumlah kunjungan yang dilakukan oleh kedua kepala negara.⁴ Tiongkok juga melakukan berbagai kerja sama dengan Korea Utara. Tiongkok memberikan bantuan berupa *technical assistance* ke Pyongyang untuk mendukung pengembangan nuklir Korea Utara.⁵ Tiongkok bahkan memberikan bantuan berupa dana hibah kepada Korea Utara dengan jumlah yang besar.⁶

² Jesse Greenspan, "8 Things You Should Know About the Korean War," *HISTORY*, diakses tanggal 18 Mei 2019, <https://www.history.com/news/8-things-you-should-know-about-the-korean-war>

³ Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance.

⁴ "China-North Korea High Level Visits Since 1953," CSIS, diakses tanggal 8 Juni 2019, <https://beyondparallel.csis.org/china-dprk-high-level-visits-since-1953-2/>.

⁵ Yukihiro Hotta, "China's Aid to North Korea — Centered on the China-North Korea Oil Pipeline," diakses tanggal 31 Mei 2019, https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/korean_peninsula/160331_Yukihiro_Hotta.pdf.

⁶ Jaewoo Choo, "Mirroring North Korea's Growing Economic Dependence on China: Political Ramifications," *Asian Survey* 48, no. 2 (Maret/April 2008): 345-347, DOI:10.1525/as.2008.48.2.343

Selain tingginya jumlah kunjungan antar kepala negara dan banyaknya kerja sama, Tiongkok selalu berupaya melindungi Korea Utara.⁷ Tiongkok menunjukkan sifat *big brother* yang siap melindungi Korea Utara dari berbagai sanksi. Tiongkok bahkan menyatakan akan memanfaatkan hak *veto* yang dimilikinya untuk menggagalkan sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi yang ingin diberikan pada saat itu terhadap Korea Utara merupakan sanksi atas peluncuran rudal balistik.⁸

1.2 Identifikasi Masalah

Hubungan aliansi seharusnya memberikan bantuan dan saling mendukung. Terutama melihat hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara yang telah lama dibangun dan memiliki hubungan yang sangat istimewa. Tiongkok seharusnya akan berusaha terus mencegah pemberian sanksi kepada Korea Utara, terutama pemberian sanksi yang bersifat tambahan.

Tindakan yang tidak terduga, Tiongkok bertindak bertentangan dengan hubungan aliansi yang ideal. Tiongkok melakukan tindakan yang memberatkan Korea Utara dengan cara menyepakati Resolusi DKPBB 2356 (2017) terhadap Korea Utara. Tiongkok memang sudah pernah menyetujui resolusi-resolusi DKPBB terhadap Korea Utara sebelum Tiongkok menyetujui Resolusi 2356 (2017) DKPBB. Meskipun Tiongkok pernah menyetujui sanksi terhadap Korea Utara, hanya Resolusi

⁷ “Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards,” IAEA, diakses tanggal 8 Juni 2019, <https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nuclear-safeguards>.

⁸ Jian Cai, “The Korea Nuclear Crisis and The Changin Sino-DPRK Relationship,” *Asian Perspective* 34, No. 1 (2010): 155, <https://www.jstor.org/stable/42704705>.

2356 (2017) DKPBB yang merupakan sanksi tambahan, bukan sanksi yang merespon terhadap tindakan provokatif Korea Utara.

Sebagai aliansi Korea Utara, Tiongkok sewajarnya membantu Korea Utara untuk menghindari Resolusi DKPBB 2356 (2017) yang merupakan sanksi tambahan terhadap Korea Utara. Karena aliansi sewajarnya saling memberikan bantuan dan dukungan antara satu dan lainnya. Sebaliknya, Tiongkok menyepakati pemberian sanksi tambahan kepada Korea Utara yang tercantum dalam Resolusi DKPBB 2356 (2017).

Tiongkok sebagai negara yang merupakan Anggota Tetap DKPBB memiliki andil yang besar terhadap disepakati atau tidak disepakatinya suatu resolusi dalam sidang DKPBB. Tiongkok juga memiliki peran sebagai aliansi Korea Utara dan negara yang memiliki hubungan paling erat dengan Korea Utara. Tiongkok memiliki posisi yang dapat menghuntungkan Korea Utara atau merugikan Korea Utara. Tiongkok memilih untuk membuat keputusan yang merugikan Korea Utara. Padahal kedua negara tersebut beraliansi dan harusnya mendukung. Terutama kedua negara ini memiliki komitmen yang kuat dalam hubungan aliansinya.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi antara aliansi Tiongkok dan Korea Utara perlu dibatasi menggunakan periode waktu dan cakupan penelitian. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk mencegah pembahasan mengenai aliansi Tiongkok dan Korea Utara menjadi terlalu luas. Sehingga, permasalahan antara

Tiongkok dan Korea Utara dipandang melalui perspektif teori aliansi. Pembahasan berfokus pada dinamika hubungan kedua negara tersebut di dalam aliansi sehingga mengakibatkan penyetujuan penambahan sanksi oleh Tiongkok terhadap Korea Utara.

Sementara pembatasan menggunakan periode waktu dibatasi dari awal terbentuknya aliansi Tiongkok dan Korea Utara hingga dikeluarkannya Resolusi DKPBB 2356 (2017). Analisis dimulai dari periode terbentuknya aliansi Tiongkok dan Korea Utara karena pembahasan ini melihat dinamika aliansi kedua negara, sehingga perlu dilihat dari awal aliansi tersebut terbentuk. Analisis berakhir pada tahun 2017 saat resolusi tersebut disahkan. Rentang waktu yang cukup panjang dibutuhkan karena penelitian ini memandang dinamika hubungan antara kedua negara di dalam aliansi.

1.2.2 Perumusan Masalah

Hubungan Tiongkok dan Korea Utara yang sedekat *Lips and Teeth* harusnya merupakan hubungan yang sangat ideal dalam beraliansi. Sewajarnya Tiongkok dan Korea Utara saling memberikan bantuan dan saling mendukung karena kedua negara tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Kenyataannya, Tiongkok menyepakati sanksi tambahan terhadap Korea Utara. Sanksi tersebut tercantum dalam Resolusi DKPBB 2356 (2017) yang merupakan resolusi tambahan terhadap Korea Utara. Terdapat perbedaan antara hubungan Tiongkok dan Korea Utara yang sangat erat dengan persetujuan pemberatan sanksi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Korea

Utara. Permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan penelitian, “Mengapa Tiongkok menyepakati pemberian sanksi tambahan dalam Resolusi DKPBB 2356 (2017) terhadap Korea Utara?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan hipotesis bahwa hubungan aliansi antara Tiongkok dan Korea Utara mengalami penurunan akibat sikap Korea Utara. Sehingga menyebabkan penyepakatan sanksi tambahan oleh Tiongkok kepada Korea Utara.

Penelitian ini berguna untuk mengasah kemampuan penulis dalam membuat penulisan ilmiah. Penelitian ini juga dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Bagi pihak lain yang meminati studi mengenai hubungan aliansi terutama hubungan aliansi antara Tiongkok dan Korea Utara, semoga hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu referensi.

1.4 Kajian Literatur

Terdapat perdebatan di antara para ahli mengenai keeratan hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara. Sehingga belum ada jawaban pasti mengenai keeratan hubungan di antara Tiongkok dan Korea Utara. Pendapat ahli-ahli tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga. Pengelompokan ini berdasarkan pada bagaimana para ahli tersebut memandang hubungan aliansi Tiongkok dan Korea Utara. Kelompok pertama menyatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara masih

merupakan hubungan aliansi yang baik. Kelompok yang kedua menyatakan bahwa Tiongkok dan Korea Utara tidak lagi berhubungan baik. Kelompok ketiga menyatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Korea mengalami penurunan, hubungan Tiongkok dan Korea Utara menjadi hubungan negara pada umumnya.

Kelompok pertama, memiliki pandangan bahwa hubungan Tiongkok dan Korea Utara masih baik. Pandangan ini disampaikan oleh Dick K. Nanto dan Mark E. Manyin. Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa Tiongkok dan Korea Utara sudah tidak lagi sejalan dalam segi ekonomi. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi Tiongkok dan Korea Utara untuk tetap menjalin hubungan baik. Keberlangsungan Korea Utara tetap menjadi hal utama yang Tiongkok ingin tetap jalankan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Gordon G. Chang menyatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara memang tidak sebaik saat aliansi kedua negara baru terbentuk. Terdapat sedikit penurunan dalam hubungan kedua negara, tidak berarti hubungan kedua negara tidak baik. Chang berargumen bahwa relasi antara kedua negara tersebut dalam keadaan baik, terbukti dengan makin eratnya hubungan ekonomi kedua negara dan bantuan signifikan yang diberikan oleh Tiongkok kepada Korea Utara.

Kelompok kedua berpandangan bahwa Tiongkok dan Korea Utara tidak lagi berhubungan baik. Pandangan tersebut disampaikan oleh Anne Wu memiliki pendapat yang termasuk dalam kelompok kedua. Dalam tulisannya, Anne Wu berpendapat bahwa hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara sudah usang dan

merupakan hubungan yang *self-destructive*. Hubungan Tiongkok dan Korea Utara merenggang karena tidak lagi mempunyai keinginan yang sama. Tiongkok memiliki intensi untuk meninggalkan traktat kerja sama antara Tiongkok dan Korea Utara. Tiongkok juga menunjukkan intensi bahwa Tiongkok ingin membatasi atau bahkan menghilangkan bantuan bagi Korea Utara.

Pandangan Anne Wu diperkuat oleh Joo Hyung-min. Dalam tulisannya, Joo Hyung-min memberikan gambaran mengenai hubungan aliansi Tiongkok dan Korea Utara. Menurut Hyung-min, Tiongkok dan Korea Utara tidak berhubungan baik. Walaupun kedua negara memiliki hubungan aliansi, Korea Utara lebih menginginkan Tiongkok untuk tidak terlibat dalam berbagai hal terkait Korea Utara. Korea Utara juga menunjukkan sikap yang jelas bahwa Korea Utara lebih baik menghadapi Amerika Serikat-Korea Selatan sendirian tanpa keterlibatan Tiongkok.

Kelompok ketiga, memiliki pandangan bahwa hubungan Tiongkok dan Korea Utara mengalami pergeseran menjadi hubungan antar negara pada umumnya. Pandangan tersebut disampaikan oleh Sun Ru. Di dalam jurnal artikelnya, Sun Ru berargumen bahwa aliansi antara Tiongkok dan Korea Utara mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah tes nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Mengakibatkan Tiongkok memiliki tendensi untuk mengubah hubungan aliansi dengan Korea Utara menjadi hubungan antar negara pada umumnya. Dalam jurnal ini disebutkan 4 faktor sebagai penyebab pergeseran sikap Tiongkok: kepentingan keamanan Tiongkok; terdapat perdebatan pada tingkatan nasional Tiongkok; sikap Korea Utara terhadap Tiongkok; dan rezim internasional. Kesimpulan yang diberikan

Sun Ru adalah terdapat banyak faktor yang mendorong Tiongkok untuk tidak lagi menjadi aliansi yang akrab bagi Korea Utara, dan justru menjadikan hubungan kedua negara ini layaknya hubungan antar negara pada umumnya.

Pandangan yang serupa dengan pandangan Sun Ru juga disampaikan oleh Jian Cai. Jian Cai menyatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara menjadi hubungan ‘pertemanan’ antar negara pada umumnya. Jian Cai berfokus pada kepentingan nasional Tiongkok dan sikap provokatif Korea Utara sebagai alasan pergeseran dalam hubungan tersebut. Sikap provokatif Korea Utara membuat Tiongkok tersudut, Tiongkok tidak dapat mempertahankan hubungan aliansi yang istimewa dengan Korea Utara. Karena Tiongkok memiliki kepentingan untuk memajukan ekonominya melalui hubungan dengan berbagai negara.

Melihat berbagai perspektif ahli mengenai hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara. Penulis memiliki pandangan yang terpengaruh dari tulisan Sun Ru bahwa hubungan Tiongkok dan Korea Utara mengalami penurunan. Tetapi, tidak dapat disangkal bahwa Tiongkok dan Korea Utara tidak lagi berhubungan baik.

1.5 Kerangka Pemikiran

Stephen M. Walt memandang aliansi sebagai sebuah bentuk komitmen secara formal maupun informal antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, keamanan, dan atau pengaruh setiap negara anggota. Hubungan tersebut memiliki tingkat komitmen tertentu dan memberikan keuntungan bagi negara yang berada di dalam aliansi; keuntungan tersebut dapat berupa otonomi,

keamanan, atau kekayaan. Serta terdapat konsekuensi jika hubungan gagal atau pun hubungan aliansi diputuskan.⁹

The Security Dilemma in Alliances Politics sebuah teori yang diusung oleh Glenn H. Snyder menjelaskan mengenai hubungan antara negara-negara di dalam aliansi. Menurut Snyder terdapat dua fase terjadinya dilemma aliansi. Pertama, sebelum aliansi tersebut terbentuk, negara-negara akan mempertimbangkan untuk membuat aliansi atau tidak. Kedua, setelah aliansi telah terbentuk, negara-negara yang terlibat dalam aliansi akan memiliki tingkat komitmen tertentu; komitmen yang kuat atau komitmen yang lemah.

Jenis aliansi setelah terbentuknya aliansi terbagi menjadi dua, yaitu aliansi dengan komitmen yang kuat dan aliansi dengan komitmen yang lemah. Jika aliansi memiliki komitmen yang kuat, terdapat komitmen yang kukuh antar negara di dalam aliansi dan juga dalam menghadapi negara lawan atau aliansi tandingan. Sementara jika aliansi memiliki komitmen yang lemah, antar negara tidak akan memberikan dukungan dan bantuan dalam menghadapi konflik dengan oposisi. Kedua komitmen tersebut dapat dipengaruhi dengan *defect* dan *cooperate*. Komitmen yang lemah dalam aliansi dapat berubah saat negara di dalamnya melakukan *cooperate*. Sebaliknya komitmen yang kuat dapat melemah saat negara di dalam aliansi melakukan *defect*.

⁹ Stephen M. Walt, *The Origins of Alliance* (New York: Cornell University Press, 1987), 1, <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt32b5fc>

Defect merupakan aspek yang lebih luas daripada *abandonment*. *Defect* secara spesifik berarti keluar dari aliansi, berpindah aliansi, membatalkan kesepakatan, tidak menjalankan sebagian dari kesepakatan, dan tidak memberikan bantuan sebagaimana yang disepakati. Tindakan yang tidak memberikan otonomi sebagaimana harusnya di dalam suatu aliansi, merupakan tindakan spesifik dari *defect*.

Hubungan aliansi yang memiliki komitmen kuat tidak berarti sepenuhnya menghuntungkan, komitmen yang kuat di dalam aliansi akan berimplikasi pada tingginya kemungkinan *entrapment*. *Entrapment* berarti terlibat dengan konflik yang dialami oleh negara tertentu dalam aliansi. Beberapa konflik memang seharusnya dihadapi bersama sebagai aliansi, akan tetapi terdapat perbedaan pemahaman setiap negara terhadap tingkat keterlibatannya dalam suatu konflik. Bila di dalam aliansi terdapat keterlibatan yang tinggi akan memunculkan sifat ketergantungan dan dukungan yang intens. Sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya *entrapment*.

Komitmen yang lemah juga memiliki konsekuensi terhadap negara yang berada di dalam aliansi. *Abandonment* secara spesifik berarti keluar dari aliansi, berpindah aliansi, membatalkan kesepakatan, tidak menjalankan sebagian dari kesepakatan, dan tidak memberikan bantuan sebagaimana yang disepakati. Bila suatu negara tidak menjalankan kesepakatan dengan baik atau tidak memberikan bantuan sebagaimana yang disepakati, maka hubungan antara kedua negara dalam aliansi tersebut akan melemah. Sementara, jika negara di dalam aliansi memilih untuk keluar atau berpindah aliansi atau membatalkan kesepakatan yang telah dibuat, maka hubungan negara-negara tersebut sebagai aliansi akan berakhir.

Memiliki komitmen yang kuat dan lemah juga memiliki sisi positif. Saat suatu aliansi memiliki komitmen yang kuat, maka kemungkinan untuk terjadinya *abandonment* berkurang. Sementara jika aliansi memiliki komitmen yang lemah kemungkinan untuk terjadinya *entrapment* berkurang.

Selain itu, memilih untuk melakukan *cooperate* di dalam aliansi juga memperkecil kemampuan negara untuk bernegosiasi terhadap keinginan negara di dalam aliansi. Tidak hanya itu, memilih untuk *cooperate* juga mengurangi 'ruang gerak' bagi suatu negara. Terutama saat negara tersebut bergantung pada negara lain di dalam aliansi, negara tersebut akan memiliki otoritas yang lebih kecil.¹⁰

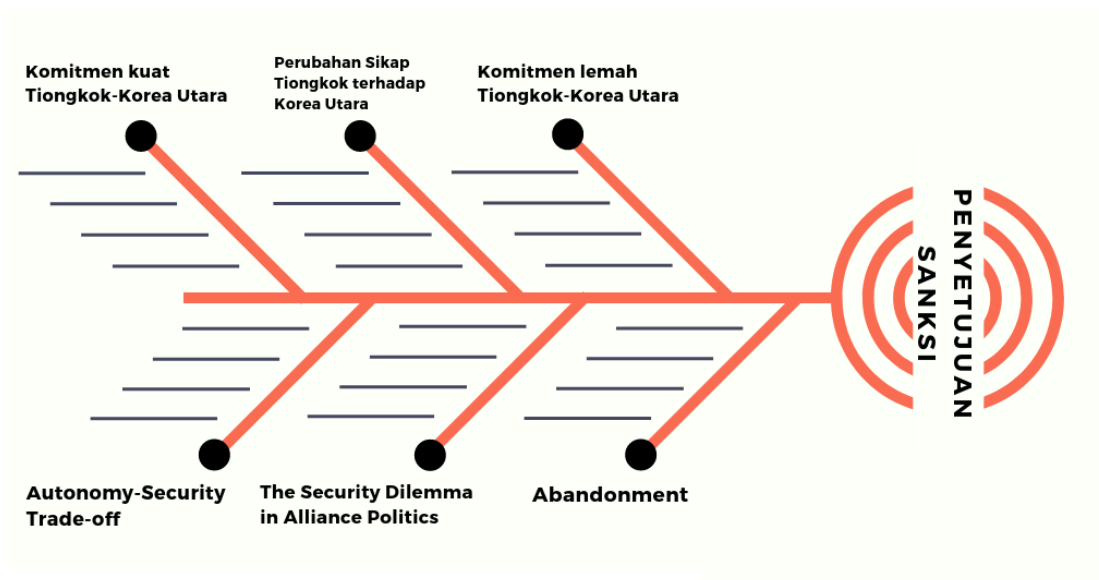
James D. Morrow dalam menjelaskan mengenai aliansi dalam hubungan asimetris dan simetris. Pembagian tersebut berdasarkan apa yang negara terima dalam suatu aliansi. Bila semua negara di dalam aliansi menerima keamanan atau semua negara di dalam aliansi menerima otonomi, maka aliansi tersebut disebut sebagai aliansi simetris. Aliansi asimetris adalah aliansi di mana sebagian negara menerima keamanan dan yang lainnya menerima otonomi.

Dalam aliansi asimetris terdapat *The Autonomy-Security Trade-off Model of Alliance Behavior*. Konsep tersebut menjelaskan bahwa dalam beraliansi, negara kekuatan kecil cenderung menginginkan kekuatan yang lebih untuk mencapai keamanan. Tentu saja negara dengan kekuatan kecil tidak memiliki kapabilitas untuk memberikan keamanan yang lebih bagi negara lain di dalam aliansi. Oleh karena itu,

¹⁰ Glenn H. Snyder, "The Security Dilemma in Alliance Politics," *World Politics* 36, No. 4 (Juli 1984): 461-495, <https://www.jstor.org/stable/2010183>.

negara dengan kekuatan kecil akan cenderung untuk menukarkan otonomi yang mereka miliki untuk mendapatkan keamanan yang lebih. Sementara negara dengan kekuatan besar sudah memiliki keamanan, sehingga akan memberikan keamanan bagi negara yang lebih kecil dan menerima otonomi dari negara yang lebih kecil. Otonomi yang dimaksud di dalam pertukaran otonomi-keamanan adalah kemampuan suatu negara untuk membuktikan diri kepada negara lain dan kemampuan untuk menentukan kebijakannya sendiri.¹¹

Model Analisis



Tabel 1.1 Diolah oleh Penulis

Model analisis yang telah dibuat oleh penulis merupakan kerangka dalam melakukan analisis pada bab ketiga. Model analisis ini menggambarkan bahwa

¹¹ James D. Morrow, "Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliances," *American Journal of Political Science* 35, No. 4 (November, 1991): 904-933, <https://www.jstor.org/stable/2111499>.

awalnya Tiongkok dan Korea Utara memiliki Komitmen yang kuat di dalam aliansinya. Kemudian model ini menjelaskan perubahan sikap Tiongkok terhadap Korea Utara menggunakan *Autonomy-Security Trade off*. Perubahan sikap tersebut berakhir pada melemahnya komitmen diantara Tiongkok-Korea Utara yang dianalisis menggunakan *The Security Dilemma in Alliance Politics*. Komitmen lemah yang berakhir pada penyetujuan sanksi oleh Tiongkok terhadap Korea Utara akan dijelaskan menggunakan *The Security Dilemma in Alliance Politics* dan konsep *abandonment*.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mencari alasan dibalik Tiongkok menyetujui sanksi tambahan terhadap Korea Utara, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu alasan dibalik suatu kejadian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.¹² Sehingga, penelitian ini bertahap sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang dimulai dengan pertanyaan penelitian, pengumpulan data yang relevan, interpretasi penulis terhadap data, penerapan konsep dan teori, dan kesimpulan.¹³ Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

¹² *Philosophy of Research: What's the Difference Between Qualitative and Quantitative Methods?* (London: SAGE Publications Inc, 2017), <http://dx.doi.org/10.4135/9781526408495>.

¹³ Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition* (New York: Oxford University Press Inc, 2012), 384.

narrative analysis. Sehingga di dalam penelitian ini ditekankan cerita untuk menjelaskan peristiwa.¹⁴

Terdapat enam teknik pengumpulan data; sampling, etnografi dan observasi langsung, wawancara, kelompok narasumber, analisis diskursus, dan dokumen sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari dokumen sebagai sumber data. Dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah dokumen resmi negara, dokumen resmi dari organisasi, dan media massa.¹⁵

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, tujuan dan kegunaan penelitian, dan metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab kedua terbagi menjadi tiga subbab. Subbab pertama menceritakan mengenai aliansi antara Tiongkok dan Korea Utara. Subbab kedua memaparkan mengenai uji coba nuklir yang telah dilakukan oleh Korea Utara, respon Tiongkok terhadap uji nuklir tersebut, dan respon DKPBB. Pada subbab terakhir, dipaparkan mengenai *Six Party Talks* dan perubahan Tiongkok pasca keluarnya Korea Utara dari *Six Party Talks*.

¹⁴ Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition*, 584.

¹⁵ Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition*, chap. 3.

Bab ketiga merupakan bagian analisa yang menggabungkan kerangka pemikiran dengan data-data dari bab kedua. Bab ketiga dibagi menjadi tiga subbab. Subbab pertama merupakan intepretasi penulis terkait data. Subbab selanjutnya merupakan analisa perubahan sikap Tiongkok terhadap Korea Utara menggunakan *The Autonomy-Security Trade-off Model of Alliance Behavior*. Subbab terakhir menganalisis data-data yang telah dimiliki menggunakan *The Security Dilemma in Alliances Politics* guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

Bab keempat merupakan kesimpulan, di mana penulis menjawab pertanyaan penelitian secara eksplisit, singkat, dan padat. Penulis juga akan memberikan saran yang diharapkan dapat dipergunakan pada penelitian mendatang.